

ABSTRAK

Dewan perwakilan rakyat daerah dalam melakukan pengawasan APBD, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan langsung kelapangan atau sidak dan kunjungan dinas, pengawasan yang dilakukan di dewan perwakilan rakyat daerah sudah menjadi kewenangan nya yang di berikan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang digunakan adalah adalah jenis yuridis sosiologis yaitu penelitian yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

Dari hasil pengawasan tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan perwakilan rakyat daerah disidang paripurna, rekomendasi untuk dijadikan pembenahan untuk tahun berikutnya demi terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien dan diberlakukan untuk kemakmuran masyarakat serta kemajuan di daerah.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan, Kewenangan.

ABSTRACT

Parliament area in observation of revenue plan and expense area, started from planning, execution, accountability of Revenue Plan and Expense Area. Directly or sudden inspection under the service visit and observation in parliament area have become its authority which giving law and regulation.

Research the used type of juridical social that is research representing approach besides using principle and ground punish in evaluating, see and analyse problem that happened, by using approach of law (approach statute) and approach of case.

From result of the observation later will yield a recommendation released by parliament area in plenary conference, recommendation to be made by correction for its year of him for the sake of executed Revenue Plan and Expense Area which is allotment and effective, efisien for the prosperity of society and also progress of area.

Keyword : (Parliament Area, Observation, Revenue Plan and Expense Area, execution, authority).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Manfaat Penulisan.....	9
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum	13
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	17
2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	20
2.2.1 Pengertian APBD	20
2.2.2 Penyusunan dan Penetapan APBD	21
2.2.3 Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD	26
2.3 Kewenangan Dan Pengawasan Oleh DPRD	29
2.3.1 Pengertian kewenangan	29
2.3.2 Pengertian Dan Tujuan Pengawasan	29
2.3.3 Teknik Pengawasan	31
BAB III PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	35
3.1 Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	35
3.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.....	44
.....	

BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57